

## Pembelajaran III

## Negara sebagai Sosialitas Manusia

*Modul III ini membahas eksistensi esensial negara sebagai salah satu wujud kongkret dari sosialitas manusia. Bagi manusia, bila menyosial itu niscaya, maka menegara juga niscaya. Pada Pembelajaran III ini kita akan mempelajari hakekat (pengertian dan fungsi) negara ditinjau dari perspektif homo socius*

**Kompetensi Dasar:**

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang eksistensi manusia dan kebutuhannya terhadap keberadaan negara
2. Mahasiswa memiliki rasa tanggungjawab dalam keterlibatannya membangun kehidupan bersama yang dialogis, harmonis, dan dinamis
3. Mahasiswa memiliki kepedulian terhadap isu-isu kehidupan bersama,

**A. Manusia Senantiasa Membutuhkan Negara**

Negara merupakan produk peradaban, produk dari eksistensi manusia. Dalam rentang panjang sejarah, sederet negara tumbuh, berkembang, dan karena sebab-sebab tertentu, seperti peperangan atau penindasan oleh yang lain, tersapu lenyap. Namun, pada kawasan yang sama akan muncul negara atau sejumlah negara baru yang menggantikannya. Sebagai ilustrasi, sebelum kolonialisme dan imperialisme bercokol, di Indonesia terdapat puluhan negara (kerajaan). Dalam rangka membangun hegemoni (kekuasaan) yang lebih besar, kerajaan yang kuat armada tempurnya menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Kerajaan pemegang hegemoni pada suatu waktu akan kehilangan kejayaannya seiring dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru, yang sebelumnya merupakan kerajaan bawahan.

Di Jawa kita mengenal pergeseran negara pemegang hegemoni secara beranting dari **Mataram Lama – Kediri – Singasari – Majapahit – Demak – Pajang – Mataram Baru**. Yang satu lenyap, yang lain muncul, terus menerus silih berganti. Karena konflik antar faksi politik istana yang akut, Mataram Baru pun harus mengakhiri karakter tunggalnya, terpecah menjadi dua: **Surakarta** dan **Yogyakarta**, dan masing-masing harus terpecah lagi. Di Surakarta, selain **Kasunanan**, ada

*Mangkunegaran*; dan di Yogyakarta, selain *Kasultanan*, terdapat *Pakualaman*. Semuanya, meskipun dilalui dengan pertikaian yang sengit, bertolak dari keinginan membangun negara.

Kolonialisme/imperialisme merobohkan negara-negara lama, tetapi darinya juga muncul tatanan kenegaraan, “**negara kolonial**”. Ketika kaum terpelajar membangun organisasi-organisasi pergerakan, tujuannya bukan semata-mata untuk melawan kekuatan kolonial, tetapi lebih jauh lagi, yakni membangun **negara bangsa**. Ketika negara bangsa telah tumbuh dan berkembang, muncul sejumlah **gerakan separatis**. Gerakan pemisahan diri ini pun tujuannya tidak lain untuk mendirikan sebuah negara independen.

Dari uraian ilustratif di atas tampak bahwa manusia dalam proses pemberadabannya senantiasa membutuhkan negara. Keniscayaan seperti ini memberi petunjuk yang jelas dan tegas mengenai peran vital negara (dalam arti luas). Tidaklah aneh bila kemudian setiap negara berkepentingan membangun kesadaran bernegara bagi seluruh elemen pembentuknya melalui apa yang lazim disebut **pendidikan politik (kewarganegaraan)**. Bagaimanapun, vitalitas negara tergantung pada intensitas dan kualitas **penegaraan warga negara** (termasuk para penyelenggara negara).

Memahami eksistensi negara bisa dijadikan sebagai langkah awal (prawacana) dalam proses pembelajaran pendidikan politik. Agar keniscayaan keberadaan negara terselami dengan lebih baik, maka perlu dikaji keterkaitan fundamentalnya dengan eksistensi manusia. Dalam konteks ini, pertanyaan ‘siapa’ tidak hanya bisa dikenakan kepada manusia, tetapi juga kepada negara. Konsepsi ‘negara adalah kita, penegaraan kita’ seperti yang digagas dan dipopulerkan oleh Driyarkara perlu mendapatkan tekanan. Hal ini penting mengingat dalam kehidupan politik kebangsaan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, **partisipasi** dan **sinergi** berbasis kesetaraan dari seluruh komponen bangsa merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan kemaslahatannya.

## B. Membangsa dan Menegara

Sama seperti pada sub B di atas, sub C tentang membangsa dan menegara ini berisi ringkasan pemikiran Driyarkara. Filsuf tangguh sekaligus pendiri Sanata

Dharma itu mengemukakan, karena berada bersama itu merupakan struktur manusia, maka pekerjaan manusia juga harus berupa kerjasama. Kesatuan 'berada' menjelma menjadi kesatuan 'bekerja'; terutama usaha mempribadikan diri harus dijalankan bersama-sama dengan sesama manusia.

Dalam mempribadikan bersama itu manusia **membangun kesatuan** yang disebut **kebangsaan**. Untuk tujuan itu manusia membangun hidupnya, dan darinya muncul bangunan-bangunan dan lembaga-lembaga. Dengan demikian sekelompok manusia yang bekerja dan hidup bersama menjadi kesatuan. Inilah permulaan dari apa yang dalam perkembangan selanjutnya menjelma menjadi **negara**. Menurut Driyarkara, *hal yang menyebabkan lahirnya negara bukanlah faktor-faktor, melainkan aktivitas manusia yang (bersifat) membangun.*

Menurut Driyarkara, dalam pandangan dinamis, negara adalah kehidupan, jadi aksi, gerak. *Manusia tidak bernegara, melainkan menegara.* Ia menegarakan diri sendiri, sesama manusia, dan tanahnya dengan seluruh keadaannya. Lebih lanjut dikemukakan, *adanya negara ialah karena dan selama manusia menegara.* Andaikata itu berhenti, maka lenyap juga negara. Karena menegara itu aksi atau perbuatan manusia, maka sebagai realisasi juga mengandung kegagalan.

**Menegara** dan menegarakan adalah **aksi bersama** yang menjelmakan **kesatuan**. Kesatuan antar manusia itu tidak bisa dipisahkan dari **keaksian**; artinya, *kesatuan dalam dan karena berbuat*. Kesatuan dan keaksian (perbuatan) bukanlah barang dua, melainkan satu. *Dengan menegara manusia membangun kesatuan, menjadi kita. Dengan perbuatan bersama, setiap warga negara dari setiap negara dapat berkata: kita adalah negara itu! Kita, yang menegara dan penegaraan kita, itulah negara!* Dasar dari keaksian bersama itu tidak lain ialah kesosialan kita.

Beraksi atau berbuat bagi manusia adalah untuk menjelmakan nilai. Nilai yang hendak dijelmakan dengan menegara adalah semua nilai-nilai manusia, sepanjang nilai-nilai itu dapat dilaksanakan dengan dan dalam kesatuan manusia. Menegara tidak begitu saja berarti melaksanakan nilai-nilai manusia. Nilai-nilai itu hanya dilaksanakan sepanjang kemungkinan, yang ada pada setiap kesatuan manusia. Kesatuan manusia yang berbuat bersama itu kita sebut organisasi. Demikianlah juga negara, sebagai organisasi sudah dengan sendirinya membawa batas-batasnya.

Dengan mengingat batas-batas tadi dapat dikatakan bahwa negara adalah kesatuan (organisasi) kerja sama untuk melaksanakan semua nilai-nilai manusia, tetapi dengan catatan bahwa nilai-nilai itu juga tidak sama sekali tergantung pada kesatuan itu. Tergantung atau kurang tergantung atau tidak tergantungnya nilai-nilai tergantung dari sifatnya. Nilai-nilai ekonomi, misalnya, lebih tergantung pada penegaraan; oleh sebab itu, juga harus lebih dinegarakan. Akan tetapi, misalnya dalam lapangan ilmu, kekuasaan negara adalah kurang. Ilmu tidak dapat didikte oleh negara.

Orang hidup bersama, bekerjasama, dan berusaha agar setiap orang bisa hidup. Masyarakat memberi kekuasaan kepada negara supaya mengatur jalannya kerjasama untuk mencari hidup itu, sehingga tidak ada kekacauan. Orang saling menghormati hak-hak orang lain, dan meskipun ada aneka usaha oleh aneka lembaga, toh kepentingan umum tetap terselenggara. Dalam konsep itu kekuasaan negara adalah untuk kepentingan warga negara, jadi negara tidak boleh menjadi diktator. Negara diberi kekuasaan menyelenggarakan tata tertib umum, supaya menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk berbagai macam usaha manusia. Diberikannya kekuasaan kepada pemerintah (penyelenggara negara) adalah untuk memungkinkan terjadinya berbagai usaha manusia dan tidak untuk menindasnya.

Namun, penegaraan itu selain setiap saat merupakan **realisasi**, setiap saat juga mengandung **kegagalan**. Manusia menginginkan keadilan, dan oleh sebab itu manusia menciptakan hukum-hukum. Akan tetapi, bukankah hukum-hukum kadang atau bahkan sering diputarbalikkan untuk memperkosa keadilan? Bukankah kadang-kadang ada pembela (abdi) keadilan (oknum) yang menginjak-injak keadilan? Untuk mengatur segala sesuatu manusia menciptakan berbagai macam peraturan, tetapi bukankah penyelenggaraannya kerap kali menjadi birokrasi rumit sehingga orang terpaksa melanggarnya? Dalam percakapan, manusia bersama, manusia mencari kesatuan. Akan tetapi, jika kesatuan sangat ditekankan, akibatnya adalah perpecahan. Sebab tidak mungkin seluruh negara disamakan, seolah-olah tidak ada perbedaan. Satu contoh lagi: manusia menciptakan demokrasi untuk menjamin kesamaan hak, untuk menghindarkan paksaan dari satu pihak ke pihak

lain. Akan tetapi, bukankah cara-cara demokrasi kerap kali disalahgunakan untuk memaksa?

Janganlah diharap bahwa suatu saat unsur kegagalan itu akan lenyap dari dunia. Unsur kegagalan itu sudah inheren (melekat) pada kodrat manusia; oleh sebab itu, melekat pada setiap perbuatan manusia. Jadi, realisasi manusia akan tetap berupa proses dari momen ke momen. Akhirnya, kehidupan negara, masyarakat manusia, selamanya akan berupa proses yang setiap saat berupa realisasi, tetapi juga dengan kegagalan. Oleh sebab itu, janganlah mengharapkan berhentinya perjuangan. Selama hidup, manusia harus terus berjuang.

### C. Pandangan Para Pemikir Besar

Untuk melengkapi pengetahuan mengenai negara, selain dari **Driyarkara** di atas, kita bisa mereview secara ringkas pandangan-pandangan lain yang pernah dikemukakan oleh sejumlah pemikir besar. **Plato**, misalnya, mengatakan **NEGARA** adalah **organisasi pengatur** bagi kesalingtergantungan manusia. Saling tergantung di sini dapat dimengerti sebagai saling membutuhkan. Agar hubungan interaktif saling silang antar manusia itu efektif dan produktif, maka diperlukan institusi (lembaga) yang kompeten untuk menciptakan, mengoperasikan, dan merawat sistem tata kelola atau manajemennya.

Melengkapi pendapat itu, negara, terutama negara-negara modern, bukan sekedar organisasi pengatur layaknya polisi mengatur lalu lintas sehingga para pengguna jalan aman, nyaman, dan lancar perjalanannya. Menurut **Aristoteles**, negara dibentuk semestinya juga untuk **menyejahterakan seluruh warga negara** dan **memanusiakan manusia**, sehingga tercapai kebahagiaan. Oleh karena itu, Aristoteles lebih lanjut menyatakan, *semua warga negara bertanggung jawab untuk memelihara persatuan, kesatuan, dan keutuhan negara*.

Menurut **Thomas Aquinas**, **NEGARA** merupakan **lembaga sosial** yang paling tinggi dan paling luas. Fungsinya, *menjamin manusia memenuhi kebutuhan fisiknya serta mengembangkan akal budi dan fikirannya*. Tugas negara adalah mengusahakan kesejahteraan dan kebajikan hidup bersama. Sementara itu, menurut **John Locke**, negara merupakan **hasil kontrak sosial**. Intinya, usaha bersama untuk saling menjaga kelangsungan hidup, kebebasan, dan hak milik. Negara hanya

dibenarkan bertindak sejauh untuk melaksanakan tujuan yang dikehendaki rakyat (Konsep Rakyat Berdaulat, Rakyat sebagai Sumber Kekuasaan).

Orang yang sepaham dengan John Locke adalah **Montesquieu** dan **Rousseau**, yang menekankan pentingnya kekuasaan negara dibatasi dan dipisahkan ke dalam tiga lembaga (**eksekutif, legislatif, dan yudikatif**). Di satu sisi, keberadaan negara mutlak dibutuhkan oleh manusia. Sementara itu, di sisi lain, kekuasaan negara perlu dibatasi dan/atau dipisahkan ke dalam tiga institusi. Konsepsi negara modern seperti ini sudah barang tentu sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Apalagi, “Awal” dan “Akhir” (serta proses-proses yang menjembatani) dari keberadaan negara adalah **rakyat** (warga negara).

#### Evaluasi/Refleksi

- 1) Benarkan manusia mutlak membutuhkan negara? Jelaskan
- 2) Berdasarkan bacaan di atas, seperti apakah gambaran Anda mengenai negara yang ideal?
- 3) Berdasarkan bacaan di atas, apa arti rakyat bagi sebuah negara? Jelaskan

#### Referensi

- A. Sudiarja, S.J. dkk (ed), *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: Kerjasama PT. Kompas Media Nusantara, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Penerbit Percetakan Kanisius, dan Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia, 2006.